

### **BAB III**

## **KONFLIK INDONESIA-TIMOR LESTE DAN KEMUNCULAN FENOMENA PENGAMBILAN PAKSA ANAK-ANAK TIMOR LESTE SELAMA KONFLIK**

Krisis politik 24 tahun Indonesia-Timor Leste (1975-1999) merupakan salah satu konflik brutal di Asia Tenggara yang disinyalir memakan korban jiwa lebih dari 200 ribu atau sepertiga populasi Timor Leste saat itu (Hainsworth & McCloskey, 1999, hal. 14), meskipun dalam sumber resmi PBB jumlah yang menjadi korban jiwa tidak mencapai lebih dari 120 ribu jiwa (Chega!, 2013, hal. 488). Krisis ini juga dipandang sebagai bentuk imperialisme/penjajahan klasik Indonesia terhadap Timor Leste berupa "... dominasi atas suatu negara melalui perebutan wilayah" (Nevins, 2009, hal. 914). Hal ini terutama karena okupasi Indonesia ke Timor Timor tahun 1975 didukung oleh negara blok Barat seperti Amerika Serikat dan Australia. Okupasi ini juga dianggap menyalahi hukum internasional (Nevins, 2009).

Bab III ini akan memaparkan konflik yang terjadi di Timor Leste dengan Indonesia dalam kurun waktu 1975 hingga 1999 serta peristiwa pengambilan anak-anak secara paksa selama konflik berlangsung. Mengetahui konflik yang terjadi akan memberi gambaran bagaimana konflik tersebut menjadi penyebab munculnya permasalahan pengambilan anak-anak Timor Leste.

#### **A. Konflik Indonesia-Timor Leste**

Timor Leste atau Timor Timur<sup>8</sup> (nama resmi: Republik Demokratik Timor Leste) merupakan negara yang terletak di

---

<sup>8</sup> Nama "Timor Leste" dan "East Timor" ("Timor Timur")—keduanya berarti "Timor Timur"—sering digunakan secara bergantian dalam publikasi bahasa Inggris. Nama negara ini berasal dari nama pulau Timor (dari bahasa Melayu, "timur") yang terbagi menjadi Timor sebelah timur dan Timor sebelah barat. "Leste" merupakan terjemahan bahasa Portugis dari kata "timur" untuk menyebut istilah Timor Timur. Dalam bahasa Tetum, digunakan pula nama "Timor Lorosa'e" yang artinya sama. Di Indonesia, istilah "Timor Timur" lebih umum digunakan untuk menyebut wilayah negara ini saat masih

Asia Tenggara, menempati bagian timur pulau Timor dan berbatasan langsung dengan provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sejarah prakolonial di Timor Leste sangat minim sumber (Braithwaite, Charlesworth, & Soares, 2012, hal. 9) dan hanya diketahui dari sumber sekunder seperti dari Portugal atau Tiongkok. Portugal mendarat di Oecusse pada 1511 kemudian memindahkan pusat koloni ke Dili pada 1771. Belanda pada 1568 juga mendarat di pulau Timor, menyebabkan konflik dan perebutan wilayah yang kemudian, pada 1859, Perjanjian Lisbon menetapkan batas antara Timor Barat (Belanda) dan Timor Timur/Timor Portugis (Portugal). Perjanjian ini semakin disahkan pula pada 1913 dalam Arbitrase Sentenca di Den Haag, yang kemudian batas wilayah kolonial inilah yang diwariskan dan sekarang menjadi batas antara Indonesia (bekas jajahan Belanda) dan Timor Leste (bekas jajahan Portugal).

Kehadiran Portugal dan pendirian koloni Timor Portugis pada 1702 pada awalnya tidak begitu banyak mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi penduduk asli Timor Portugis. Hal ini karena pusat koloni Portugal di Asia Timur terletak di Goa, India dan Portugal hanya menjadikan Timor sebagai pos perdagangan. Perdagangan pun masih didominasi oleh pedagang Tiongkok yang telah ada setidaknya sejak abad ke-14, berdagang cendana dan sutera (Malagina, 2015, hal. 58). Baru pada awal abad ke-20 Portugis mulai menguatkan pengaruhnya di Timor Portugis dengan perdagangan budak, penetapan pajak, tanam paksa serta konstruksi jalan, dan usaha-usaha kolonial lain hingga 1974 (Braithwaite, Charlesworth, & Soares, 2012, hal. 10). Selama Perang Dunia II, Portugal bersikap netral sehingga Timor Portugis menjadi tempat berlindung pasukan Australia didesak oleh Jepang dari Timor Barat.

Pasca perang dunia semangat dekolonisasi digaungkan dan rupanya Portugal juga terkena dampaknya; pada 25 April

---

berada dalam masa okupasi Indonesia dan setelah merdeka negara ini lebih umum disebut "Timor Leste". Sementara itu, istilah "Timor Portugis" banyak digunakan berbagai literatur untuk menyebut wilayah ini semasa menjadi koloni Portugal, paralel dengan istilah "Hindia Belanda" untuk menyebut wilayah Indonesia semasa menjadi koloni Belanda. Lihat *Per Memoriam Ad Spem*, hal. 335.

1974, pemerintahan Antonio de Oliveira Salazar yang fasis di Portugal digulingkan dalam Revolusi Anyelir<sup>9</sup>. Salah satu semangat dari revolusi ini adalah adanya dekolonisasi negara-negara jajahan Portugal, termasuk Timor Portugis. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Timor Portugis sehingga pada 28 November 1975 kemerdekaan secara unilateral dari Portugal dinyatakan di Timor Leste.

### 1. Okupasi Indonesia (1975-1999)

Sebagai bentuk persiapan dekolonisasi oleh Portugal, pada 1974 Timor Portugis membentuk partai-partai politik. Di antara partai-partai yang dibentuk, ada tiga partai besar yaitu Frente Revolucionária Timor Leste Independente/Front Revolusioner Timor Timur Merdeka (Fretilin)<sup>10</sup>, União Democrática Timorese/Uni Demokratik Timor (UDT), dan Associação Popular Democrática de Timor/Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor (Apodeti). Ketiga partai ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai masa depan Timor Leste; UDT menghendaki Timor Leste menjadi wilayah “otonomi progresif” di bawah Portugal (tapi kemudian juga mendukung kemerdekaan sepenuhnya Timor Leste), Apodeti menghendaki integrasi dengan wilayah Indonesia, sementara Fretilin menginginkan kemerdekaan Timor Leste secara penuh. Perbedaan pandangan ini memunculkan konflik horizontal berupa konflik bersenjata antara UDT dan Fretilin pada Agustus 1975 yang mengakibatkan Gubernur Timor Portugis menyingkir ke pulau Atauro, menandai Timor secara *de facto* tidak lagi dikelola oleh Portugal. Pasca mengamankan posisinya di Timor Portugis, Fretilin

---

<sup>9</sup> Disebut “Carnation Revolution” atau “Revolusi Anyelir” (dalam bahasa Portugis “Revolução dos Cravos”) karena revolusi ini berjalan damai tanpa ada pertumpahan darah. Selain itu, selama demonstrasi massa menaruh bunga anyelir di senapan tentara yang menghadang sebagai simbol perdamaian.

<sup>10</sup> Awalnya partai ini bernama Associação Sosial Democrática Timorese/Asosiasi Sosial Demokratik Orang Timor (ASDT) namun kemudian berubah menjadi Fretilin dan memiliki haluan yang lebih radikal. Lihat *Chega! Volume I, Part 3: History of the Conflict*, hal. 168.

menyatakan kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975, yang dianggap tidak sah<sup>11</sup> oleh pemerintah Portugal yang secara *de jure* masih memegang kedaulatan administratif atas wilayah Timor Portugal (Per Memoriam Ad Spem, 2008, hal. 39).

Menanggapi situasi di Timor Portugis, pada 7 Desember 1975 pemerintah Indonesia menyerang Dili, secara formal memulai invasi Indonesia atas Timor Leste dalam Operasi Seroja oleh TNI<sup>12</sup>. Ada beberapa alasan pemerintah Indonesia melancarkan operasi ini sekaligus kemudian menganeksasi wilayah Timor Portugis. *Pertama*, adanya alasan historis bahwa Timor Portugis merupakan satu kesatuan dengan Timor Barat, sehingga merupakan satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga. Meskipun begitu, pandangan ini berubah-ubah. Pada 1963, Menteri Penerangan Indonesia Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa Indonesia akan mendukung Timor Portugis jika ingin menjadi bagian NKRI; pada 1974, Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan bahwa Indonesia mendukung Timor Portugis untuk menentukan nasib mereka sendiri. Baru ketika pasca proklamasi kemerdekaan oleh Fretilin, sikap Indonesia kemudian lebih lugas menyatakan bahwa Timor Portugis merupakan bagian dari NKRI. Menurut Anwar Sani, Duta Besar Indonesia untuk PBB pada 13 Desember 1975:

“Timor Portugis adalah bagian dari pulau Timor, bagian lain dari pulau tersebut adalah wilayah Indonesia. Timor terletak di tengah-tengah

---

<sup>11</sup> Meskipun begitu, dunia internasional sebagian menganggap ini sebagai kemerdekaan Timor Leste yang sah; dukungan muncul terutama dari negara bekas koloni Portugal di Afrika seperti Mozambik, Guinea-Bissau, Sao-Tome dan Principe, Cape Verde, Angola, dan Guinea, serta dari negara berhaluan sosialis-komunis seperti Albania, China, dan Vietnam. Lihat “The Indonesian Takeover of East Timor”, jurnal *Asian Survey*, Vol. 16, No. 10, hal. 953.

<sup>12</sup> Di era sebelum reformasi masih disebut sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

kepulauan Indonesia, satu dari ribuan pulau yang membentuk kepulauan. Penduduk Portugis Timor...berasal dari etnis yang sama dengan penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Pemisahan selama 450 tahun karena dominasi kolonial tidak menghapuskan ikatan erat darah dan kultur antara penduduk wilayah ini dan kerabat mereka di Timor Indonesia. Kedekatan geografis dan kekerabatan etnis adalah alasan-alasan penting mengapa Indonesia sangat peduli dengan keamanan dan stabilitas di Timor Portugis.” (Chega!, 2013, hal. 162)

*Kedua*, adanya keinginan dari partai dalam Timor Portugis sendiri untuk bergabung dengan Indonesia—terutama pasca konflik dengan Fretilin—membuat Indonesia merasa mendapat legitimasi dari rakyat Timor Portugis untuk mengintegrasikan wilayah Timor Portugis ke dalam wilayah NKRI. Hal ini diperkuat dengan Deklarasi Balibo oleh UDT dan Apodeti serta dua partai kecil Timor Portugis Klibur Oan Timur Aswain/Persatuan Pejuang Timor (KOTA) dan Tralabalista yang menyatakan bahwa keempat partai ini mengintegrasikan wilayah Timor Portugis ke wilayah NKRI. Meskipun deklarasi ini—sama seperti proklamasi Fretilin—tidak diakui oleh pemerintah Portugal dan Indonesia pun tidak secara eksplisit mendukung, namun Indonesia menyatakan “... bersimpati dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partai-partai UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA yang atas nama rakyat Timor Portugis menyatakan diri ke dalam Negara Republik Indonesia” (Per Memoriam Ad Spem, 2008, hal. 39).

*Ketiga*, situasi di Timor dianggap mengancam keamanan dan stabilitas kawasan sehingga pemerintah Indonesia merasa perlu ikut secara langsung dalam permasalahan ini. Berbagai pertemuan bilateral antara

Indonesia dan Portugal seperti pertemuan di Lisbon pada 14-15 Oktober 1974, pertemuan di London 9 Maret 1975, serta pertemuan multilateral Indonesia, Portugal, serta UDT, Fretilin, dan Apodeti di Macau pada 26-28 Juni 1975 merupakan upaya pemerintah Indonesia mendorong integrasi yang juga dianggap sebagai pilihan terbaik oleh Portugal<sup>13</sup>. Pada akhir 1974, dibentuk Operasi Komodo sebagai persiapan dan pengawasan terhadap aktivitas di pulau Timor serta merupakan upaya infiltrasi secara intelijen untuk mendukung integrasi. *Keempat*, secara spesifik berbagai pihak lain seperti Australia mendukung integrasi karena khawatir Timor Portugis akan mendapat pengaruh kuat dari Uni Soviet dan Tiongkok melalui Fretilin yang berpaham tengah-kiri. Pada pertemuan di Wonosobo 6 September 1974 dan di Townsville 4 April 1975 antara Presiden Suharto dan PM Gough Whitlam, Australia menyatakan dukungan terhadap upaya integrasi karena jika tidak maka Timor Portugis akan menjadi basis Uni Soviet dan Tiongkok, yang merupakan "... duri di mata Australia dan duri di punggung Indonesia" (Chega!, 2013, hal. 179).

Operasi militer Indonesia direspons dengan kontak senjata oleh Fretilin yang merupakan penguasa *de facto* dan semi *de jure* di Timor Portugis. Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste/Pasukan Pembebasan Nasional Timor Leste (Falintil), kelompok sayap militer Fretilin, memimpin serangan melawan TNI terutama dalam bentuk gerilya. Periode tahun 1977 hingga 1979 merupakan puncak konflik antara TNI dan Falintil, dikenal dengan periode "*Encirclement and Annihilation*" ("Pengepungan dan Pembasmian) karena gerakan TNI yang mengepung Falintil di hutan dan pegunungan. Pada periode ini TNI unggul dari Falintil, terutama karena posisi Falintil yang terdesak di

---

<sup>13</sup> Bahkan, menurut tokoh Revolusi Anyelir Jenderal Costa Gomes: "... Timor Lorosae akan seperti Goa di India: mudah diserap dan masuk ke dalam wilayah Indonesia yang lebih besar" (Abdulsalam, 2017; Anderson, Benedict, 2001, hal. 233).

pedalaman serta karena adanya dukungan negara-negara Barat terhadap Indonesia, misalnya pada 1978 AS mengumumkan penjualan pesawat tempur dan senjata, Australia memasok helikopter dan pesawat angkut, dan Inggris memasok helikopter serangan darat (Chega!, 2013, hal. 222-223). Keunggulan Indonesia kemudian membuat Falintil menyerah di Los Palos pada 1978 dan keadaan mulai relatif stabil pada awal tahun 1979.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta mengonsolidasikan pemerintahan Provinsi Timor Timur yang telah secara resmi dibentuk sejak 17 Juli 1976 melalui penandatanganan petisi pengajuan integrasi dari Majelis Rakyat Timor Timur—yang sebagian besar beranggotakan tokoh-tokoh UDT dan Apodeti—oleh presiden Suharto. Sistem pemerintahan di Timor Timur memang sama seperti provinsi lain di Indonesia, terdiri dari pimpinan eksekutif dan legislatif tingkat I (gubernur dan parlemen tingkat provinsi) dan tingkat II (bupati/walikota dan parlemen tingkat kabupaten/kota) yang diteruskan ke pemerintahan lokal ke pedesaan. Namun, di samping pemerintahan sipil wilayah Timor Timur juga secara khusus memiliki struktur militer yang berbeda dengan provinsi Indonesia lain, di mana terdiri dari struktur teritorial (yang sama dengan dengan provinsi lain)<sup>14</sup> dan struktur operasional (dibentuk karena kebutuhan TNI meredam aksi perlawanan dari kelompok-kelompok pro kemerdekaan). Sehingga, secara praktek wilayah Timor Timur masih tetap bergejolak; akses luar (internasional) ke wilayah Timor Timur dibatasi dan diawasi ketat bahkan bagi lembaga bantuan dan kemanusiaan internasional.

---

<sup>14</sup> Doktrin dwifungsi ABRI menciptakan sistem di mana militer memiliki hierarki seperti pemerintahan sipil, dimulai dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Region Militer (Korem) setingkat provinsi hingga Bintara Setingkat Desa (Babinsa) setingkat desa. Lihat *Per Memoriam Ad Spem*, hal. 45.

Pasca kekalahan Falintil di Los Palos pada 1979, Indonesia berfokus pada operasi ‘pembersihan’ skala kecil di bawah komando Operasi Kikis/Operasi Keamanan pada 1981. Operasi ini berhasil semakin melemahkan basis Fretilin dan Falintil, terbukti dengan kemudian berubahnya haluan Fretilin yang tadinya menolak negosiasi menjadi lebih lunak dan mau membuka jalur diplomasi dengan Indonesia. Selain itu, ideologi Fretilin yang radikal dan tengah-kiri kemudian diubah untuk disesuaikan dengan Conselho Nacional de Resistência Timorese/Dewan Nasional Perlawanan Timor (CNRT) yang merupakan upaya Fretilin merangkul partai dan faksi lain di Timor Timur untuk membangun front bersatu atas dasar umum kemerdekaan. Pada 1982 hingga 1983, Indonesia kembali menguatkan posisi di Timor Timur; pasca 1983, keadaan di Timor Timur cenderung stabil dan relatif aman kembali. Kendati masih terdapat beberapa perlawanan, namun lebih banyak aksi dilakukan melalui negosiasi dan diplomasi, baik kepada Indonesia maupun dunia internasional, serta melalui gerakan klandestin (bawah tanah) lewat pemerintah lokal di desa untuk mendukung gerakan kemerdekaan. Pada 1988 Timor Timur pun akhirnya dibuka bagi dunia internasional oleh pemerintah Indonesia, menandai semakin gencarnya kunjungan dari negara, organisasi, dan lembaga perjuangan HAM dari luar yang dapat dimanfaatkan Timor Timur untuk memperoleh simpati dan dukungan bagi gerakan kemerdekaan.

Memasuki 1990an terjadi empat peristiwa penting yang mengubah dinamika konflik dan perjuangan kemerdekaan di Timor Timur. *Pertama*, peristiwa pembantaian Santa Cruz pada November 1991. Ketika itu, kelompok massa pro kemerdekaan sedang mengadakan misa kematian seorang aktivis pro kemerdekaan, Sebastio Gomez, yang tewas karena kerusuhan dengan kelompok pro Indonesia. Pasca



mengikuti misa di gereja, kelompok ini kemudian menghimpun diri menjadi demonstrasi dan bergerak ke makam Gomez di Santa Cruz sambil meneriakkan tuntutan kemerdekaan Timor Leste. Ternyata, di Santa Cruz telah bersiap TNI yang kemudian menimbulkan bentrokan antara kelompok bersenjata dan demonstran. Menurut TNI, korban tewas dari demonstran sebanyak 50 orang, namun pihak pro kemerdekaan dan penyelidikan lain mengungkap jumlah sampai 270 orang. Selain itu, korban tewas juga berasal berasal dari pres dan masyarakat sipil lain terutama aktivis organisasi internasional yang berada di tempat tersebut (Amnesty International, 1991; DH, 2016). Peristiwa ini juga memancing perhatian internasional untuk mengungkap peristiwa-peristiwa serupa lain yang pernah terjadi sebelumnya—seperti pembantaian di Lacluta pada 1981 dan Kraras pada 1983—serta meningkatkan dukungan internasional untuk menghentikan kekerasan pemerintah Indonesia di Timor Timur.

*Kedua*, penangkapan Xanana Gusmão, pemimpin Fretilin, pada November 1992 dan pengeblosan ke penjara Cipinang, Jakarta pada 1993. Meskipun di dalam penjara, rupanya Gusmão tetap dapat memimpin perlawanan. Pemenjaraannya di Jakarta malah membuat Gusmão sering dikunjungi oleh para aktivis dan organisasi internasional hingga tokoh dunia seperti Nelson Mandela yang bersimpati dengan perjuangan rakyat Timor Timur, yang kemudian semakin meningkatkan dukungan internasional terhadap Timor Timur. *Ketiga*, penganugerahan Nobel perdamaian bagi José Ramos-Horta (delegasi Fretilin untuk PBB dan tokoh yang diplomasi Timor Timur di kancah internasional) dan uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sebagai bentuk dukungan moral komunitas internasional terhadap perjuangan Timor Timur yang selama itu merupakan “konflik yang terlupakan” (Chega!, 2013, hal. 272).

*Keempat*, adanya pergantian sistem politik Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi yang ditandai dengan mundurnya presiden Suharto dan digantikan oleh presiden B.J. Habibie. Pergantian ini menjadi penting karena ketetapan presiden Habibie yang kemudian membatasi pengaruh militer di pemerintahan sipil merupakan bentuk awal berkurangnya pengaruh militer di wilayah Timor Timur. Rezim baru ini juga membuka peluang adanya kesempatan bagi Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri; pada 9 Juni 1998 presiden Habibie menerima proposal dari menteri luar negeri mengenai menentukan status otonomi khusus bagi Timor Timur dan pada Januari 1999 dia menyatakan bahwa akan mengizinkan masyarakat Timor Timur menentukan nasib mereka sendiri, bahkan jika menginginkan kemerdekaan sekalipun (Chega!, 2013, hal. 275-277).

## **2. Referendum hingga Pengakuan Kemerdekaan (1999-2002)**

Menindaklanjuti proposal Juni 1998 mengenai penentuan status otonomi khusus bagi Timor Timur dan pernyataan pemerintah Indonesia pada Januari 1999, PBB kemudian memfasilitasi rencana otonomi khusus dan menyiapkan nama Special Autonomous Region of East Timor/Wilayah Otonomi Khusus Timor Timur (SARET) bagi wilayah itu jika menghendaki otonomi khusus di bawah Indonesia. Jika tidak setuju menjadi wilayah otonomi khusus, maka—sesuai dengan pernyataan kebijakan pemerintah Indonesia pada Januari 1999—Indonesia akan mencabut UU Nomor 7 Tahun 1976 mengenai pengintegrasian wilayah Timor Portugis menjadi provinsi Indonesia, menandakan bahwa Timor Timur dapat menjadi negara berdaulat. Keputusan ini dicapai dalam Kesepakatan 5 Mei (5 May Agreement) di New York antara Indonesia, PBB, dan Portugal<sup>15</sup>. Dalam

---

<sup>15</sup> PBB tidak mengakui okupasi Indonesia atas Timor Timur, menganggap wilayah Timor Timur sejak tahun 1974 merupakan *Non-Self Governing Territory*, dan menyatakan bahwa kedaulatan administratif Portugal atas wilayah Timor Timur masih

kesepakatan tersebut, Indonesia menolak menggunakan kata “referendum” dan memilih menggunakan istilah “konsultasi rakyat” untuk menghindari membuka ‘luka lama’ bahwa ini adalah persaingan di dalam masyarakat Timor Timur sendiri antara yang menginginkan integrasi dan merdeka; bahwa istilah “konsultasi rakyat” (*“popular consultation”*) lebih halus dan lebih mengisyaratkan bahwa Indonesia menganggap masyarakat Timor sebagai satu kesatuan rakyat bukan terpecah antara pendukung integrasi atau kemerdekaan. Selain itu, istilah “referendum” juga dianggap akan menghilangkan legitimasi Deklarasi Balibo yang menyatakan bahwa masyarakat Timor Timur telah memutuskan untuk berintegrasi dengan Indonesia (Lloyd, 2003, hal. 80-81).<sup>16</sup>

Pada awalnya jejak pendapat direncanakan untuk dilaksanakan pada 8 Agustus 1999, namun karena diperlukan berbagai persiapan lebih maka baru dapat dilaksanakan pada 30 Agustus 1999. Jejak pendapat ini diselenggarakan oleh United Nations Mission in East Timor (UNAMET) dengan mandat Resolusi Dewan Keamanan No. 1246 tanggal 11 Juni 1999, sementara pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap keamanan selama jejak pendapat berlangsung. Pada malam sebelum jejak pendapat, Presiden Habibie berpidato menyatakan pentingnya persatuan dan niat komitmen Indonesia menyelesaikan masalah Timor Timur. Dengan tetap bergabung dengan Indonesia, maka pembangunan yang telah ada dapat tetap berlanjut. Keesokan harinya pada 30 Agustus 1999, jejak pendapat berlangsung relatif damai dan menghasilkan 78,5 persen masyarakat Timor Timur tidak menghendaki otonomi

---

sah secara hukum karena Portugal belum secara resmi menetapkan dekolonisasi, sehingga Portugal diikutsertakan dalam perundingan. Pengakuan mengenai kedaulatan Portugal atas Timor Timur dapat dilihat dalam resolusi PBB mengenai Timor Timur sejak tahun 1975 hingga 1982.

<sup>16</sup> Istilah “referendum”, “konsultasi rakyat”, dan “jejak pendapat” tetap digunakan secara bergantian untuk menyebut proses pemungutan suara ini.

khusus dan menginginkan kemerdekaan<sup>17</sup>. Hasil ini tetap saja mengejutkan berbagai pihak dalam pemerintahan Indonesia yang percaya bahwa masyarakat Timor Timur akan lebih memilih otonomi khusus ketimbang merdeka. Jejak pendapat pun seakan dilaksanakan cepat-cepat oleh pemerintah Indonesia karena yakin akan hal ini, serta jejak pendapat akan menyelesaikan masalah Timor Timur sehingga pemerintah Indonesia dapat berfokus ke hal lain seperti perbaikan sistem demokrasi pasca reformasi dan memudahkan Indonesia mendapat bantuan dana dari luar negeri pasca krisis moneter 1997 tanpa ada kecaman mengenai kasus Timor Timur (Rabasa & Chalk, 2001, hal. 21).

Dalam periode sebelum dan sesudah jejak pendapat, konflik masih kerap terjadi meskipun suasana relatif aman. Konflik terjadi terutama antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi yang dikenal dengan milisi Mahidi (Mati Hidup dengan Indonesia) yang memiliki hubungan erat dengan TNI. Periode pasca referendum—dimulai segera setelah pengumuman jejak pendapat pada 4 September 1999—dikenal dengan periode “bumi hangus” karena TNI dan milisi pro integrasi banyak menghancurkan infrastruktur yang dibangun era Suharto dan menimbulkan korban jiwa antara 1200 hingga 1500 orang dan 2500 orang dipindahkan secara paksa ke Timor Barat (Chega!, 2013, hal. 283, 299). Menurut Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP HAM) yang dibentuk pada 22 September 1999 oleh Komnas HAM, ada 14 kasus utama konflik terjadi dalam kurun waktu April hingga Desember 1999 (Per Memoriam Ad Spem, 2008, hal. 85). Pada 6 September 1999, Sekretaris Jenderal PBB meminta Australia untuk mengirimkan

---

<sup>17</sup> Pemilih berjumlah sebanyak 438,968 suara, dengan 344.580 atau 78,50 persen opsi kedua (menolak otonomi khusus dan memilih berpisah dengan Indonesia). Sedangkan sisanya sebanyak 94.388 suara atau 21,50 persen memilih menerima otonomi khusus Timor Timur dalam Indonesia (Firman T. , 2016).

pasukan multinasional untuk menjaga stabilitas di Timor Timur dan pada 7 September Indonesia membebaskan Xanana Gusmão dan menyatakan status Darurat Militer di wilayah Timor Timur (White, 2008, hal. 81-82). Ketidakmampuan TNI dalam meredam konflik dan malah cenderung mendukung kelompok pro integrasi kemudian disambut dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 1264 tentang penerjunan pasukan koalisi yang dipimpin Australia, sebagai kelanjutan evakuasi staf UNAMET dalam Operation Spitfire pada 9 dan 14 September 1999 (Breen, 2008, hal. 137). Pada 20 September, International Force East Timor (INTERFET) diterjunkan di Timor Timur.

Pada 25 Oktober 1999 United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dibentuk untuk bekerja sama dengan CNRT sebagai institusi yang membantu transisi pemerintahan. Pada 30 Oktober, personel TNI terakhir meninggalkan Timor Timur, menandai secara sah berakhirnya okupasi Indonesia atas wilayah Timor Timur yang kemudian menjadi Timor Leste (Republik Demokratik Timor Leste). Hubungan Indonesia-Timor Leste pun cepat mengalami normalisasi melalui kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid pada 29 Februari 2000 dan kunjungan Presiden Megawati Sukarnoputri pada deklarasi kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002.

**Tabel 3.1:**  
**Kronik peristiwa konflik Indonesia-Timor Leste**

<b>Waktu</b>	<b>Peristiwa</b>
1511	Portugal mendarat di Oecusse
1702	Pendirian koloni Timor Portugis
1771	Pemindahan pusat koloni dari Oecusse ke Dili
1859	Perjanjian Lisbon menetapkan batas antara Timor Portugis dan Hindia Belanda (Timor Barat)
1913	Arbitrase Sentenca di Den Haag memperkuat legalitas Perjanjian Lisbon, yang kemudian menjadi batas Indonesia-Timor Leste
25 April 1974	Revolusi Anyelir dan masa dekolonisasi di Portugal
28 November 1975	Proklamasi kemerdekaan Timor Portugis oleh Fretilin
7 Desember 1975	Operasi Seroja dimulai
13 Desember 1975	Duta Besar Indonesia untuk PBB menyampaikan urgensi integrasi Timor Portugis ke Indonesia
17 Juli 1976	Provinsi ke-27 Timor Timur resmi dibentuk
1977-1979	Periode Pengepungan dan Pembasmian oleh TNI
1978	Falintil menyerah di Los Palos
1981	Operasi Kikis/Operasi Keamanan dijalankan
1988	Timor Timur dibuka untuk dunia internasional
12 November 1991	Peristiwa Santa Cruz
1992	Penangkapan Xanana Gusmão dan pengeblosan ke penjara Cipinang pada 1993
1996	Penganugerahan Nobel kepada José Ramos-Horta dan uskup Carlos Filipe Ximenes Belo
1998	Reformasi Indonesia, pada 9 Juni Presiden Habibie menerima proposal otonomi khusus Timor Timur
Januari 1999	Pemerintah Indonesia menyatakan sikap pertama kali mendukung penentuan nasib sendiri rakyat Timor

11 Juni 1999	UNAMET dibentuk
30 Agustus 1999	Jejak Pendapat dilaksanakan
4 September 1999	Pengumuman hasil Jejak Pendapat, periode “bumi hangus” dimulai
7 Desember 1999	Xanana Gusmão dibebaskan, Timor Timur dinyatakan darurat militer
20 September 1999	INTERFET diterjunkan
25 Oktober 1999	UNTAET dibentuk
30 Oktober 1999	TNI resmi meninggalkan Timor Leste
29 Februari 2000	Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid
20 Mei 2002	Deklarasi kemerdekaan Timor Leste

*Sumber: Chega! Volume III.:History of the Conflict, 2013.*

## **B. Pengambilan Paksa Anak-Anak Timor Leste Selama Konflik**

CAVR menemukan berbagai pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia selama konflik berlangsung. Pelanggaran ini dikategorikan menjadi pelanggaran fatal, pemindahan, dan pelanggaran non fatal. Pelanggaran fatal menyebabkan kematian yang berasal dari pembunuhan dan sebab lain seperti kelaparan dan penyakit. Pelanggaran non fatal meliputi penahanan, penyiksaan, dan bentuk perlakuan buruk lainnya, yang jumlahnya tidak dapat secara pasti disebutkan. Kategori lain, pemindahan—baik antar distrik, antar region, dalam Timor Leste, maupun ke luar Timor Leste—, memakan korban total 120 ribuan pada 1975 dan 1976 serta 2 ribuan pada 1999 (Chega!, 2013, hal. 488-489).

Dalam setiap konflik, anak-anak selalu menjadi korban utama karena kondisi fisik yang tidak begitu kuat untuk bertahan dalam konflik. Di Timor Timur sendiri selama masa konflik dengan Indonesia, anak-anak Timor Timur merupakan korban terbesar baik karena konflik langsung maupun karena penyakit. Anak-anak Timor Timur juga dipaksa menjadi

Tenaga Bantuan Operasional (TBO) ABRI untuk membawa logistik, membawa amunisi, memandu tentara melalui wilayah yang tak dikenal, mengambil air, kayu bakar, dan keperluan lainnya (Menemukan Kembali Indonesia, 2014, hal. 134). Selain itu, anak-anak juga menjadi korban trauma karena pelecehan seksual dan menyaksikan peristiwa sadis selama konflik, serta kehilangan hak identitas karena banyak yang dipindahkan dari keluarga mereka (Chega!, 2013, hal. 2141; Hirst & Linnarsson, 2010, hal. 3).

Anak-anak yang diambil ke Indonesia (baik secara paksa maupun diadopsi karena merupakan yatim piatu) merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai peraturan yang dianut oleh masyarakat internasional maupun Indonesia sebagai *occupying power* di wilayah Timor Timur. Menurut UNHCR, kontrol terhadap anak-anak penting dalam suatu konflik karena anak-anak merupakan masa depan masyarakat yang dapat menentukan hasil dari konflik di masa depan; “Perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang meluas mencakup bagaimana upaya mengontrol anak-anak” (Chega!, 2013, hal. 2141).

Mustahil untuk mendata secara pasti jumlah anak-anak yang dipindahkan selama konflik 1975-1999 karena proses pemindahan anak-anak ini benar-benar tidak diawasi melalui regulasi yang benar dan dilaksanakan melalui jalur-jalur yang beragam seperti TBO, pengambilan secara langsung dari keluarga, pengambilan/adopsi dari panti asuhan, ataupun diselundupkan bersama barang-barang logistik tentara. Menurut International Committee of the Red Cross (ICRC), ada lebih dari 4000 kasus orang hilang terutama pada periode 1970an dan 1980an, 2400 di antaranya merupakan anak-anak yang dikirim ke Indonesia. Gubernur Timor Timur tahun 1982-1992, Mario Carrascalão menyebutkan bahwa dalam satu dekade ia menjabat ada sekitar 20-30 anak-anak dilaporkan hilang per tahun. Jumlah ini belum ditambah dengan jumlah anak-anak yang hilang dan dipindahkan dalam kerusuhan 1999 pasca jejak pendapat. Menurut UNHCR, antara 1976 hingga 1999 sebanyak 4534 anak-anak telah dipindahkan dari Timor Leste.



**Tabel 3.2:**  
**Jumlah anak Timor Leste yang dipindahkan ke Indonesia**  
**selama konflik 1975-1999**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anak</b>	<b>Sumber Informasi</b>	<b>Keterangan</b>
1970an-1980an	>1000	Staf TNI	Dari laporan Helene van Klinken, <i>East Timorese Children in Java: Submission II</i> , 2002, yang dilaporkan ke CAVR
1975-1999	770	Lokakarya UNHCR di Dili, 2003	508 laki-laki dan 262 perempuan; 29 anak umur 0-5 tahun, 262 anak umur 6-12 tahun, 228 anak umur 13-15 tahun, dan 251 anak umur 16-18 tahun.
1975-1999	60	Staf Panti Asuhan Seroja	
1975-1999	2400	International Refugee Council (IRC), UNHCR, dan Student Solidarity Council	
1977	20	Temuan Chega!	“Anak-Anak Presiden”
1982-1992	±200-300	Gubernur Timor Timur Mario Carrascalão	

1999	74	Panti Asuhan Seroja	
1999	150	Yayasan Hati	Diambil dari kamp pengungsi di Timor Barat (Nusa Tenggara Timur, Indonesia)
1999	118	Jesuit Refugee Service	Ditemukan di berbagai institusi pengasuhan anak di Jawa Tengah
1999	19	Yayasan Tunas Kalimantan	Dikirim ke Kalimantan
1999-2001	164	Temuan Chega!	Dikirim ke Jawa
<b>Total</b>		<b>+3245</b>	
<b>Total Menurut UNHCR: 4534</b>			

*Sumber: Chega! Volume III, Part 7.8.: Violation of the Rights of the Child, 2013.*

### 1. Periode 1976-1979

Mayoritas kasus pemindahan anak-anak Timor Leste ke Indonesia terjadi dalam periode 1976-1979 di mana dalam periode ini terjadi Operasi Seroja yang membuat kekacauan dan instabilitas besar-besaran di Timor Timur. Kondisi yang penuh kekerasan serta, tidak adanya penegakan hukum, serta banyaknya yatim piatu akibat kematian dan kelaparan orang-orang tua membuat dan terpisahnya keluarga membuat suasana pengambilan anak-anak Timor Leste cenderung dapat secara masif dilakukan.

Pada periode ini, ada dua tipe pemindahan. *Pertama*, dilakukan personel pangkat menengah dan rendah yang menemukan anak-anak di medan pertempuran atau mengambil secara langsung dari keluarga. Dalam kasus ini biasanya anak-anak diambil tanpa kesepakatan dengan orang tua. Menurut keterangan staf Rumah Sakit Militer Wirahusada di Dili, pada 1976

tentara membawa anak-anak lemah, kelaparan, dan sekarat ke rumah sakit untuk dirawat. Biasanya, tentara yang membawa anak tersebut ke rumah sakit kemudian akan membawa anak tersebut ke Indonesia ketika masa dinas berakhir. Terkadang, staf rumah sakit yang membawa anak-anak tersebut ke rumah agar tidak dibawa ke Indonesia oleh tentara yang menyelamatkan mereka. Selain di rumah sakit, tentara juga membawa anak-anak yang mereka temukan di medan pertempuran ke Panti Asuhan Militer Seroja di Dili. Selain di rumah sakit dan panti asuhan, tentara juga membawa anak-anak yang sudah menjadi TBO dan dalam praktek lain, tentara sengaja mendatangi secara langsung rumah-rumah penduduk untuk meminta anak mereka diambil untuk diasuh di Indonesia.

CAVR tidak menemukan bukti bahwa pemindahan anak-anak ini merupakan kebijakan militer berkaitan dengan operasi di Timor Timur. Sangat kecil kemungkinan bahwa personel berpangkat tinggi mengizinkan kegiatan ini bagi personel bawahan. Meskipun begitu, pihak yang memiliki otoritas kemudian berusaha mengaturnya dalam regulasi yang harus disepakati baik oleh pengasuh maupun dari orang tua dan atau pihak rumah sakit/panti asuhan. Namun rupanya regulasi ini banyak yang tidak mengindahkan, terutama karena pemindahan anak-anak ini sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti memasukkan anak-anak ke kotak-kotak perlengkapan dan diselundupkan bersama kapal yang menuju ke Indonesia. Selain itu, panti asuhan/rumah sakit juga kerap memberikan anak-anak Timor Leste ke tentara yang mengaku tidak memiliki anak, tapi proses ini tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan militer maupun pemerintah.

*Kedua*, pemindahan anak-anak yang dilakukan pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga amal. Sedikit berbeda dengan yang dilakukan secara individu oleh personel militer, dalam kasus ini, sebagian mendapat izin

dari orang tua karena orang tua diberi dalih agar anak-anak disejahterakan dan diberi akses pendidikan yang lebih baik di Indonesia, meskipun kemudian anak-anak dan orang tua mereka di Timor Leste tetap dipisahkan dan tidak difasilitasi untuk dapat berkomunikasi lagi. Program pemindahan anak-anak ke Indonesia agar mendapat pendidikan yang layak juga disponsori oleh parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Pada 1977, sebanyak 20 anak dikirim ke Jawa untuk bertemu dengan Presiden Suharto dan diajak berkeliling tempat-tempat wisata dan kemudian diasuh oleh Yayasan Supersemar milik Suharto, memberi kesan bahwa rezim Suharto peduli terhadap anak-anak Timor Leste. Anak-anak ini—dikenal sebagai “Anak-Anak Presiden”—menjadi alat propaganda rezim Suharto untuk memberi kesan bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia.

## **2. Periode 1980-1999**

Pada periode 1980-1989 ketika kondisi relatif stabil di Timor Timur, pemindahan anak-anak ke Indonesia tetap berlanjut. Bedanya, pada masa ini tidak hanya personel berpangkat rendah yang mengambil anak tapi juga pejabat-pejabat militer setingkat komandan (brigadir jenderal) sehingga kabar mengenai pengambilan anak-anak oleh militer Indonesia sampai ke masyarakat Indonesia di luar Timor Timur. Adopsi publik ini dilakukan untuk meneruskan propaganda bahwa anak-anak ini merupakan bagian dari Indonesia, dan janji-janji menyejahterakan anak-anak ini di Indonesia menimbulkan kesan bahwa Indonesia bukanlah penjajah seperti Portugal yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat (Chega!, 2013, hal. 2155).

Selain oleh pejabat militer, pada masa ini anak-anak diambil pula oleh institusi keagamaan (Islam), terutama lembaga dakwah seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Yayasan Kesejahteraan Islam Nasrullah (Yakin). Menurut kepala DDII, ada

utusan dakwah DDII ke Timor Timur pada 1983 namun akibat keterbatasan akses dakwah (karena mayoritas penduduk Timor Timur Katolik) maka, alih-alih melakukan dakwah ke masyarakat, DDII mengambil anak-anak untuk diberi pelajaran agama di pesantren di Makassar antara 1980an hingga 1990an; pemindahan ini dibantu oleh TNI. Sementara itu, Yakin berfokus pada pembangunan sekolah umum menengah, sekolah teknik, dan sekolah Islam (pesantren). Antara tahun 1983 hingga 1999, Yakin mengorganisir pemindahan anak-anak ke beberapa pesantren di kota-kota lain di Indonesia seperti Makassar, Semarang, Bandung, Surabaya, Jombang, dan Malang. DDII dan Yakin mengaku bahwa pemindahan anak-anak telah mendapat izin dari orang tua, meskipun CAVR tidak dapat melakukan verifikasi karena mayoritas anak-anak ini telah berganti nama dan sulit dilacak. Lembaga-lembaga keagamaan lain seperti Hidayatullah, An-Nur, dan Lemorai juga memindahkan anak-anak ke pesantren-pesantren di Indonesia, namun banyak anak-anak ini yang dikirim kembali ke Timor Leste untuk menyebarkan Islam (Chega!, 2013, hal. 2155-2156).

Pada awal 1990an, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) RI mencanangkan program pengurangan jumlah pengangguran di Timor Timur untuk mengurangi aktivitas mereka di demonstrasi dan bentuk kegiatan politis lain. Depnaker bekerja sama dengan Yayasan Tiara milik anak Suharto membawa pemuda-pemuda Timor Timur untuk bekerja di pabrik-pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Program ini diimplementasikan akibat banyaknya desakan dan tuntutan bagi kesejahteraan masyarakat Timor Timur bersamaan dengan dibukanya Timor Timur bagi dunia luar. Banyak di antara pekerja muda ini tidak diupah dengan layak; menurut laporan Asia Watch tahun 1992, pemuda Timor Timur memang sukarela mengikuti program bekerja Depnaker, tapi lingkungan kerja dan

ketidakmampuan finansial membuat mereka tidak dapat kembali ke Timor Leste (Chega!, 2013, hal. 2157).

Pada 1999, banyak laporan anak-anak dievakuasi oleh rumah sakit dan panti asuhan untuk menghindari kerusuhan yang terjadi pasca referendum/jejak pendapat. Misalnya, 74 anak-anak di panti asuhan Seroja terpaksa dievakuasi ke pelabuhan Dili untuk dikirim ke Kupang, kemudian ke Flores. Pada November 1999, anak-anak ini diserahkan ke UNHCR untuk dikembalikan ke keluarga mereka, namun beberapa anak tidak dapat menemukan keluarga mereka. Lembaga lain—yang bahkan tidak memiliki *record* memindahkan anak dari Timor Leste—kemudian ikut mempraktekkan hal yang sama pasca referendum, salah satu yang terkenal adalah Yayasan Hati yang mengirim 150 anak-anak Timor Leste di kamp di Timor Barat ke Jawa Tengah untuk kemudian ditempatkan di Yogyakarta.

Pasca keadaan mulai stabil di bawah administrasi UNTAET, para orang tua yang mencari anaknya mengalami kesulitan karena tidak tahu institusi/lembaga mana yang harus dituju. Selain itu, kesulitan juga diakibatkan oleh lembaga-lembaga yang tidak mau melepaskan anak-anak yang telah mereka asuh dari Timor Leste; Yayasan Hati menyatakan bahwa anak-anak ini adalah warga Indonesia, sehingga tidak dapat dipulangkan ke Timor Leste, sementara lembaga Al Anshar di Makassar menuduh UNHCR berusaha “menculik” anak-anak Timor Leste dari mereka dan meminta kompensasi sebesar 5000 dolar AS.

### **3. Kondisi Anak-Anak yang Dipindahkan**

Meskipun tidak sedikit anak-anak yang dibawa ke Indonesia mendapat perlakuan baik dan mengalami peningkatan kesejahteraan, namun lebih banyak yang mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan mengenai perlindungan anak. *Pertama*, jelas anak-anak ini kehilangan identitas kultural mereka sebagai masyarakat Timor Leste, mulai dari lupa akan

asal-usul di Timor Leste, kehilangan kemampuan berbahasa Tetum (dan bahasa lokal lain), pindah agama tanpa persetujuan pribadi, dan bahkan di beberapa kasus anak-anak yang diambil sewaktu masih bayi tidak diberi tahu sama sekali oleh pengasuh mereka bahwa mereka adalah anak adopsi dari Timor Leste. Anak-anak ini—yang sekarang telah dewasa—akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali jika mendapat kesempatan untuk pulang ke keluarga asli mereka di Timor Leste.

*Kedua*, anak-anak ini mengalami penganiayaan atau perlakuan yang tidak pantas. Anak-Anak Presiden, misalnya, meskipun di media dikabarkan mendapat perhatian Presiden Suharto namun mendapat perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik di panti asuhan di Ungaran. Orang tua anak-anak di pesantren di Makassar pernah berupaya mengunjungi mereka di pesantren, namun tidak diizinkan bertemu. Sebagian anak-anak yang melarikan diri dari panti asuhan/pesantren tempat mereka diasuh kemudian melaporkan perbuatan pengasuh mereka ke pihak berwajib, namun ditanggapi dengan tidak kooperatif dan memberi solusi. *Ketiga*, anak-anak mengalami eksploitasi yang dilakukan oleh pengasuh mereka di Indonesia seperti menjadi buruh kasar dan pembantu rumah tangga tanpa dibayar secara layak. Akibatnya, banyak anak-anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Banyak juga anak-anak yang melarikan diri dari panti asuhan kemudian hidup di jalanan.

*Keempat*, banyak anak-anak mengalami trauma dan cacat fisik maupun mental selama di bawa ke Indonesia. Anak-anak ini terutama merupakan anak-anak yang pernah menjadi TBO dan kemudian diasuh oleh mantan personel TNI. Trauma akan perang dan cacat akibat kekerasan fisik di masa konflik masih berbekas; beberapa anak mengalami instabilitas emosi sehingga putus sekolah dan mengalami gangguan psikologis (Asia Justice and Rights, 2016b, hal. 12).

*Kelima*, kesulitan mendapatkan legalitas hukum, misalnya mendapat dokumen kependudukan dan paspor. Meskipun sudah tinggal di Indonesia namun mereka memiliki kesulitan mendapat status sebagai penduduk Indonesia karena masalah administratif, seperti perbedaan nama di dokumen awal dan nama mereka yang telah diganti oleh pengasuh. Selain itu, mereka juga tidak dapat membuat akta kelahiran karena orang tua asli mereka bukan orang Indonesia, sementara dokumen adopsi mereka juga tidak sah. Ketika mendapat kesempatan mengikuti program reuni dengan keluarga mereka di Timor Leste, mereka kesulitan mengurus paspor sehingga membuat beberapa peserta batal bertemu dengan keluarga di Timor Leste.